



ANALISIS BIAYA SOSIAL DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bingar Handal Pratama¹, Dimas Prabowo²,
 Muhamad Agiel Amin³, Raizky Rienaldy Pramasha⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 Email : bingarpratama0510@gmail.com

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Artikel ini membahas hubungan antara biaya sosial dan permasalahan pengelolaan lingkungan dalam konteks berbagai sistem ekonomi dan peran pemerintah. Pertama, dibahas mengenai sistem harga dengan kewajiban membayar biaya kerusakan lingkungan, di mana pihak yang mencemari wajib menanggung beban biaya kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian, artikel mengeksplorasi alternatif lain, yaitu sistem harga tanpa kewajiban pembayaran biaya kerusakan, yang berpotensi mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Biaya transaksi di pasar juga diulas, terutama bagaimana faktor ini dapat menghambat atau mempermudah mekanisme pengendalian kerusakan lingkungan. Peran pemerintah menjadi sorotan utama sebagai regulator yang dapat menetapkan aturan dan batasan guna menjaga keseimbangan antara hak kepemilikan dan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, dibahas pula mengenai pembatasan hak penguasa, yang bertujuan untuk menghindari monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Terakhir, artikel ini memaparkan cara untuk memperkirakan biaya pencemaran, yang merupakan langkah penting dalam upaya mitigasi dan manajemen kerusakan lingkungan secara efisien.</i></p>	<p>Diajukan: 20-07-2024 Diterima: 19-09-2024 Diterbitkan : 25-10-2024</p> <p>Kata kunci: <i>Biaya Sosial; Pengelolaan Lingkungan; Sistem Harga; Peran Pemerintah; Biaya Pencemaran</i></p> <p>Keywords: <i>Social Costs; Environmental Management; Pricing System; Government Role; Cost of Pollution assical, modern test theory, IRT, Rasch model, assessment</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>This article discusses the relationship between social costs and environmental management problems in the context of various economic systems and the role of government. First, a price system with an obligation to pay the costs of environmental damage is discussed, where the polluting party is obliged to bear the burden of the costs of the damage caused. Then, the article explores another alternative, namely a pricing system without mandatory payment of damage costs, which has the potential to ignore the environmental impacts of economic activity. Transaction costs in the market are also reviewed, especially how these factors can hinder or facilitate environmental damage control mechanisms. The government's role is in the main spotlight as a regulator that can set rules and restrictions to maintain a balance between property rights and environmental responsibilities. Apart from that, it also discusses limiting the rights of authorities, which aims to avoid monopoly or abuse of power in managing environmental resources. Finally, this article describes a way to estimate the costs of pollution, which is an important step in mitigating and efficiently managing environmental damage.</i></p>	

Cara mensitasi artikel:

Pratama, B.H., Prabowo, D., Amin, M.A., Pramasha, R.R. (2024). Analisis Biaya Sosial dan Permasalahan Pengelolaan Lingkungan. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 2(3), 20-29. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>

PENDAHULUAN

Isu pengelolaan lingkungan semakin diprioritaskan di berbagai negara karena dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap ekosistem semakin meningkat. Perubahan iklim, penurunan kualitas udara dan air, serta kerusakan keanekaragaman hayati merupakan beberapa contoh nyata dari permasalahan lingkungan yang timbul akibat pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam situasi ini, mengatasi biaya sosial dari kerusakan lingkungan adalah hal yang signifikan yang masyarakat harus hadapi, baik langsung maupun tidak langsung. Sistem ekonomi tradisional seringkali tidak memasukkan biaya kerusakan lingkungan ke dalam perhitungan harga pasar, sehingga tercipta ketimpangan antara kepentingan pelaku industri dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Jadi, timbul diskusi mengenai cara yang tepat untuk mengatur sistem harga - apakah harus memasukkan biaya kerusakan atau memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi tanpa harus bertanggung jawab atas dampak tindakan mereka terhadap lingkungan. Selain itu, biaya transaksi pasar dalam pengelolaan lingkungan seringkali menyulitkan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan melestarikan lingkungan.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting sebagai regulator yang menetapkan aturan main dan mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan. Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan adanya batasan yang jelas terhadap hak penguasaan dan kekuasaan individu dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Artikel ini akan membahas berbagai pendekatan dalam menilai dan mengelola biaya sosial dari kerusakan lingkungan. Selain itu, juga akan dibahas bagaimana mekanisme sistem harga, peran pemerintah, dan pembatasan hak kepemilikan berperan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, akan dijelaskan pula metode perkiraan biaya pencemaran sebagai langkah penting dalam membangun kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan efisien.

METODE

Untuk mengeksplorasi biaya sosial dan permasalahan pengelolaan lingkungan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang kompleks ini.

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali perspektif mendalam mengenai bagaimana pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat memahami biaya sosial dari kerusakan lingkungan.

Metode ini menggunakan metode wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang lingkungan. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan pandangan mereka tentang dampak ekonomi dari kerusakan lingkungan dan efektivitas kebijakan yang ada.

2. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur biaya pencemaran dan dampak ekonominya secara lebih objektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi Analisis Biaya-Manfaat yakni penelitian ini akan melakukan analisis biaya-manfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan yang telah diterapkan. Dengan membandingkan biaya sosial yang ditimbulkan oleh pencemaran dengan manfaat ekonomi dari tindakan pengendalian, peneliti dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan bersumber dari:

- Data Primer: Data yang diperoleh langsung melalui wawancara, survei, dan studi kasus.
- Data Sekunder: Data yang diambil dari laporan penelitian sebelumnya, dokumen kebijakan pemerintah, dan statistik resmi terkait kondisi lingkungan dan biaya sosial yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola dari wawancara dan studi kasus. Sementara itu, data kuantitatif akan dianalisis menggunakan perangkat statistik untuk menguji hipotesis dan melihat hubungan antara variabel yang diteliti. Dengan mengadopsi metode penelitian campuran ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai biaya sosial dan pengelolaan lingkungan, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk kebijakan yang lebih efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Sistem Harga dengan Kewajiban Membayar Biaya Kerusakan

Sistem harga dengan kewajiban membayar biaya kerusakan adalah pendekatan di mana pelaku industri yang menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan diwajibkan untuk menanggung biaya yang ditimbulkan akibat aktivitas mereka. (Yunita, 2015) Pendekatan ini berlandaskan pada konsep eksternalitas negatif, di mana kerugian yang timbul dari aktivitas ekonomi seperti pencemaran udara, air, atau tanah biasanya tidak tercermin dalam harga pasar. Tanpa intervensi, biaya dari kerusakan lingkungan ini cenderung dibebankan kepada masyarakat atau alam itu sendiri. Oleh karena itu, dengan menerapkan kebijakan yang mengharuskan pelaku industri membayar biaya kerusakan, seperti melalui pajak lingkungan atau denda, pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk menginternalisasi biaya eksternal ini.

Sebagai contoh, pajak karbon yang diterapkan pada emisi gas rumah kaca bertujuan untuk membebankan biaya kerusakan lingkungan kepada perusahaan yang menghasilkan polusi. Dengan membayar pajak atau denda ini, perusahaan secara langsung menanggung beban atas dampak negatif dari kegiatan produksi mereka. Langkah ini tidak hanya mendorong perusahaan untuk mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat memotivasi mereka untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dan beralih ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penerapan sistem harga ini dapat menciptakan insentif bagi perusahaan

untuk berinovasi, mengembangkan energi terbarukan, atau meningkatkan efisiensi produksi mereka untuk mengurangi biaya kerusakan yang harus ditanggung.

Selain itu, sistem harga dengan kewajiban membayar biaya kerusakan juga dapat memengaruhi perilaku konsumen. Konsumen yang sadar lingkungan mungkin akan lebih memilih produk dari perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama jika produk tersebut memiliki jejak lingkungan yang lebih rendah. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya mendorong perubahan di tingkat perusahaan tetapi juga menciptakan tekanan sosial dari konsumen yang menginginkan pilihan yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, penerapan sistem harga ini berpotensi menghasilkan dampak yang lebih luas dalam mendorong keberlanjutan lingkungan, baik dari sisi produsen maupun konsumen.

b. Sistem Harga Tanpa Harus Membayar Biaya Kerusakan

Sistem harga tanpa kewajiban membayar biaya kerusakan adalah pendekatan di mana pelaku industri tidak diwajibkan untuk menanggung dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi mereka terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, perusahaan bebas untuk beroperasi tanpa memperhitungkan biaya sosial dari pencemaran atau degradasi lingkungan yang mereka timbulkan. Karena tidak ada mekanisme yang mengharuskan internalisasi biaya eksternalitas, seperti pajak lingkungan, denda, atau peraturan yang ketat, perusahaan cenderung lebih fokus pada mengejar keuntungan jangka pendek. Akibatnya, mereka sering mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, seperti penurunan kualitas air, udara, dan tanah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas (Agustia, 2010).

Dalam sistem ini, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengurangi limbah, emisi, atau praktik yang merusak lingkungan. Hal ini memperparah kerusakan alam, karena pelaku industri tidak memiliki motivasi finansial untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau dalam praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Ketika kerusakan lingkungan terjadi, biaya yang ditimbulkan—seperti kesehatan masyarakat yang memburuk, penurunan keanekaragaman hayati, atau peningkatan bencana alam terkait perubahan iklim—ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Dampak ini sering kali bersifat kumulatif, di mana semakin lama tidak ada regulasi atau kebijakan yang menuntut tanggung jawab perusahaan, semakin besar pula beban sosial yang harus ditanggung.

Pendekatan ini juga meningkatkan ketidakseimbangan dalam distribusi biaya dan manfaat. Perusahaan mungkin memperoleh keuntungan besar dari operasi mereka, sementara masyarakat menanggung kerugian dalam bentuk pencemaran lingkungan dan degradasi kualitas hidup. Tanpa regulasi atau kebijakan yang efektif, dampak negatif terhadap lingkungan ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dalam jangka panjang, sistem harga yang tidak memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan berisiko menciptakan masalah lingkungan yang jauh lebih sulit dan mahal untuk diatasi, mengorbankan kelangsungan ekosistem dan kualitas hidup generasi mendatang.

c. Biaya Transaksi Pasar serta Peran Pemerintah

Biaya transaksi pasar merujuk pada semua biaya yang terlibat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Ini mencakup berbagai komponen, seperti:

- **Biaya Negosiasi:** Biaya yang timbul saat pihak-pihak terlibat dalam pembicaraan untuk mencapai kesepakatan, termasuk waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk merundingkan syarat dan ketentuan transaksi.
- **Biaya Kontrak:** Setelah kesepakatan dicapai, biaya lain muncul dalam bentuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Ini mencakup biaya hukum dan administrasi untuk menyiapkan dokumen kontrak, serta biaya untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.
- **Biaya Pengawasan:** Setelah kontrak ditandatangani, biaya untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam kontrak juga merupakan bagian dari biaya transaksi. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama dalam konteks kebijakan lingkungan.

a. Dampak Biaya Transaksi terhadap Kebijakan Lingkungan

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, biaya transaksi dapat berfungsi sebagai penghalang dalam implementasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Beberapa dampak yang mungkin timbul meliputi:

- **Kesulitan dalam Negosiasi:** Pelaku industri sering kali beragam dalam ukuran, kapasitas, dan tujuan, yang dapat menyulitkan proses negosiasi. Misalnya, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dalam negosiasi yang kompleks dengan pemerintah atau pihak lain, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap kebijakan yang merugikan.
- **Ketidakpastian dan Risiko:** Biaya transaksi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko di antara pelaku industri. Jika perusahaan merasa bahwa biaya untuk mematuhi kebijakan lingkungan akan lebih tinggi daripada manfaatnya, mereka mungkin cenderung untuk menolak atau mengabaikan kebijakan tersebut.
- **Penurunan Partisipasi:** Tingginya biaya transaksi dapat mengurangi partisipasi pelaku industri dalam program keberlanjutan, seperti program pengurangan emisi atau pengelolaan limbah. Tanpa partisipasi aktif, efektivitas kebijakan lingkungan akan terhambat.

b. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Biaya Transaksi

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi biaya transaksi pasar dan mendorong pelaksanaan kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah meliputi:

- **Penyederhanaan Regulasi:** Pemerintah dapat berusaha untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan regulasi terkait lingkungan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mematuhi peraturan. Dengan prosedur yang lebih efisien, pelaku industri dapat lebih mudah beradaptasi dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan.
- **Fasilitasi Negosiasi:** Pemerintah dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam negosiasi antara pelaku industri dan masyarakat. Dengan menciptakan forum untuk diskusi, pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan solusi yang

saling menguntungkan dan lebih mudah mencapai kesepakatan.(Safitri et al., 2022)

- Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan: Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi pelaku industri, terutama usaha kecil dan menengah, untuk memahami dan mematuhi kebijakan lingkungan. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, perusahaan akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan.
- Pengembangan Sistem Insentif: Menciptakan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dapat mengurangi beban biaya transaksi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk teknologi bersih atau pengurangan pajak bagi perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan.(Syamsudin et al., 2021)

d. Pembatasan Hak Penguasa

1. Konsep Pembatasan Hak Penguasa

Pembatasan hak penguasa adalah upaya untuk membatasi kekuasaan individu atau entitas tertentu dalam pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, "penguasa" dapat merujuk pada pemerintah, perusahaan besar, atau bahkan individu yang memiliki akses ke sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pembatasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

2. Pentingnya Pembatasan

Pembatasan hak penguasa memiliki sejumlah tujuan penting:

- Mencegah Eksploitasi Berlebihan: Tanpa adanya pembatasan, penguasa dapat dengan leluasa mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pembatasan ini mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan.
- Melindungi Kepentingan Masyarakat: Pembatasan hak penguasa membantu melindungi hak dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Dengan adanya regulasi, masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- Mengurangi Monopoli dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Pembatasan juga bertujuan untuk mencegah monopoli, di mana satu entitas memiliki kontrol total atas sumber daya tertentu. Monopoli dapat mengakibatkan ketidakadilan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

3. Teori Institusi dan Partisipasi Masyarakat

Teori institusi menekankan pentingnya peraturan dan struktur yang mengatur interaksi antara berbagai aktor dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, pembatasan hak penguasa berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik. Beberapa poin kunci dalam teori institusi dan partisipasi masyarakat meliputi:

- Aturan yang Jelas: Pembatasan hak penguasa harus dilandasi oleh peraturan yang jelas dan transparan, sehingga semua pihak memahami batasan dan

tanggung jawab mereka. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang penting dalam pengelolaan sumber daya.

- Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya sangat penting. Dengan memberikan suara kepada masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan dan diakomodasi dalam proses pengelolaan. (Isnaeni, 2020)

4. Contoh Pembatasan Hak Penguasa

Beberapa bentuk pembatasan hak penguasa yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam antara lain:

- Pengaturan Izin Penggunaan Lahan: Pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang ketat terkait penggunaan lahan, seperti persyaratan izin sebelum melakukan kegiatan eksploitasi. Ini dapat membantu mencegah perubahan penggunaan lahan yang merusak lingkungan.
- Pengelolaan Sumber Daya Air: Pembatasan terhadap hak penggunaan sumber daya air dapat membantu mencegah pengambilan air yang berlebihan, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Regulasi yang ketat juga dapat memastikan bahwa kualitas air tetap terjaga dan tidak tercemar.
- Perlindungan Kawasan Konservasi: Pembatasan hak penguasa juga mencakup perlindungan terhadap kawasan konservasi dan area sensitif secara ekologis. Ini dapat melibatkan larangan aktivitas yang merusak lingkungan, seperti penebangan hutan atau penambangan di kawasan konservasi. (Abu bakar. M, 2019)

e. Perkiraan Biaya Pencemaran

Perkiraan biaya pencemaran adalah proses sistematis untuk menghitung nilai ekonomi dari kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Tujuan dari perkiraan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, dan biaya yang terkait dengan penanganan masalah kesehatan yang muncul akibat pencemaran.

1. Pentingnya Perkiraan Biaya Pencemaran

Perkiraan biaya pencemaran memiliki sejumlah manfaat penting:

- Dasar untuk Pengambilan Keputusan: Dengan informasi yang akurat tentang biaya pencemaran, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif terkait kebijakan lingkungan. Hal ini penting untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pencemaran.
- Alokasi Sumber Daya yang Efisien: Memahami biaya pencemaran memungkinkan pemerintah dan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Ini membantu dalam menentukan prioritas intervensi dan program yang paling membutuhkan perhatian.
- Mendorong Kesadaran Masyarakat: Data mengenai biaya pencemaran dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Dengan memahami dampak pencemaran, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan. (Mursinto & Kusumawardani, 2016)

2. Metode untuk Memperkirakan Biaya Pencemaran

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk memperkirakan biaya pencemaran, termasuk:

- Analisis Biaya-Manfaat: Metode ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi pencemaran dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengurangan tersebut. Dengan analisis ini, pembuat kebijakan dapat mengevaluasi apakah investasi dalam pengurangan pencemaran sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan, seperti peningkatan kesehatan masyarakat dan perlindungan ekosistem.
- Pemodelan Ekosistem: Pendekatan ini menggunakan model matematis untuk menggambarkan interaksi antara komponen ekosistem dan dampak pencemaran terhadap kualitas lingkungan. Dengan pemodelan ekosistem, peneliti dapat memperkirakan kerugian yang disebabkan oleh pencemaran dan dampaknya terhadap layanan ekosistem, seperti penyediaan air bersih dan pengendalian pencemaran. (Larasati & Purwendah, 2022)
- Survei untuk Mengumpulkan Data Persepsi Masyarakat: Melalui survei, informasi tentang persepsi masyarakat terhadap pencemaran dan dampaknya dapat dikumpulkan. Data ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat menilai nilai lingkungan dan dampak kesehatan yang terkait dengan pencemaran.

3. Aplikasi Data Biaya Pencemaran

Informasi mengenai biaya pencemaran dapat digunakan dalam berbagai cara:

- Perumusan Kebijakan yang Tepat: Pembuat kebijakan dapat menggunakan data untuk merancang regulasi yang lebih efektif dan menetapkan standar lingkungan yang sesuai, berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang biaya pencemaran.
- Program Pengurangan Pencemaran: Data biaya pencemaran dapat membantu dalam merancang program yang ditujukan untuk mengurangi emisi dan limbah, serta meningkatkan praktik berkelanjutan di industri.
- Mendorong Partisipasi Masyarakat: Dengan menyediakan informasi yang jelas tentang dampak pencemaran, masyarakat dapat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti program pembersihan atau advokasi kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan lingkungan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam mengenai biaya sosial yang timbul dari aktivitas industri dan dampaknya terhadap lingkungan. Artikel ini menyoroti beberapa aspek penting dalam pendekatan kebijakan lingkungan:

1. Sistem harga dengan kewajiban membayar biaya kerusakan mendorong bisnis untuk menginternalisasi dampak lingkungan dalam operasi mereka. Dengan membebankan biaya kerusakan kepada pelaku industri, metode ini mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mengurangi dampak lingkungan yang negatif dan mendorong perilaku konsumen yang lebih bertanggung jawab.
2. Sistem harga tanpa harus membayar biaya kerusakan sebaliknya, sistem ini memungkinkan pelaku industri mengabaikan dampak lingkungan, yang sering mengakibatkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan kerusakan lingkungan

yang semakin parah. Tanpa mekanisme pengendalian, sistem ini menimbulkan beban sosial yang semakin besar, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun degradasi ekosistem.

3. Biaya transaksi pasar dan peran pemerintah menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan lingkungan dengan mengurangi biaya transaksi yang tinggi. Pemerintah harus mendorong pelaksanaan kebijakan yang ramah lingkungan, mempermudah perundingan antara pelaku industri dan masyarakat, dan menyederhanakan regulasi.

Sedangkan saran penelitian ini untuk mengatasi kerusakan lingkungan, pemerintah perlu memperkuat regulasi lingkungan dengan menerapkan hukuman tegas dan kebijakan seperti pajak pencemaran atau denda yang konsisten, disertai evaluasi rutin agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pemberian insentif seperti keringanan pajak atau akses pendanaan hijau dapat mendorong industri untuk menerapkan teknologi bersih. Upaya lain meliputi penyederhanaan sistem transaksi pasar melalui platform digital yang transparan guna menurunkan biaya dan meningkatkan kepatuhan. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui forum konsultasi publik dan peran aktif organisasi sipil untuk memastikan suara mereka diakomodasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, M. (2019). Hak mengajukan gugatan dalam sengketa lingkungan hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93–108.
- Agustia, D. (2010). Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 190. <https://doi.org/10.26740/jaj.v1n2.p190-214>
- Astuti, Sri dan Ichsan. 2002. Akuntansi Biaya Lingkungan: Suatu Konsep dan Permasalahannya. *Media Akuntansi*. Edisi 28: 58-62.
- Azis, Iwan J. et al. (eds), 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Chandra, Laurentia Alice. 2006. Analisis Manajemen Biaya Lingkungan sebagai Respon terhadap Perolehan Sertifikasi ISO 14001:2004 pada PT Hari Terang (Baterai ABC) di Surabaya. Skripsi
- Chalid, Pheni, 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Hansen, Don R & Maryanne M Mowen. 2007. *Akuntansi Manajemen*, Buku 1. Edisi ketujuh. Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Isnaeni, N. (2020). Peran Strategis Pemerintah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Global & Strategis*, 7(1), 123–138. www.nasional.kompas.com
- Johnson, Craig. (2013). *Pembangunan Tanpa Teori; Kuasa Pengetahuan dan Perubahan Sosial*. Resist Book; Yogyakarta.
- Larasati, G. P., & Purwendah, E. K. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 150–166. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1611>

- Mursinto, D., & Kusumawardani, D. (2016). Estimasi Dampak Ekonomi Dari Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 163. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i2.3677>
- North, Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*.
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Sunu, Pramudya. 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*. Jakarta. Grasindo.
- Syamsudin, S., Praswati, A. N., Sari, N. P., & Murwanti, S. (2021). Kapabilitas Organisasi Pendorong Kinerja Usaha: Pandangan Teori Resource Based View. *Urecol Journal. Part B: Economics and Business*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.53017/ujeb.29>
- Yunita, A. (2015). Biaya Sosial Sebagai Bagian Corporate Social Responsibility Dalam Sudut Pandang Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–18.